



SEMINAR &
KONFERENSI
NASIONAL

2nd **KONRA RIAU**
Konferensi Riset Akuntansi Riau



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Wahyudin Nor

Sebagai Pemakalah

Dalam Acara

2nd KONRA RIAU (Konferensi Riset Akuntansi Riau)

Seminar & Konferensi Nasional dengan tema:

"Akuntan di Era Disruptif Digital"

Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik-Forum Dosen Akuntansi

Tanggal 3-4 November 2021



Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua IAI KAPd



Dr. Novita Indrawati, SE., M.Si., Ak., CA
Koordinator IAI KAPd - FDAPT Riau

CO-HOST



SPONSOR



Transparansi Anggaran pada *Website* Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Wahyudin Nor¹, Lili Safrida², Fahmi Rizani³ dan Diah Fitriaty⁴

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin

Correspondent: wahyudinnor@ulm.ac.id

Abstract

There is a gap in the practice of budget transparency through website and the majority of local governments have not optimized the use of Internet technology. The purpose of this paper is to examine the extent to which level of higher education, internet access in households, local revenue, local expenditure and intergovernmental revenue influence budget transparency on the official website of local government. The data of this research comprise 102 budget document during the period 2017–2019 collected from 34 local governments across Indonesia by employing the census method. The data then are analyzed using logistic regression. The results of this study show that level of higher education and internet access in households has a positive significant influence to budget transparency on local government websites in Indonesia, while the local revenue, local expenditure and intergovernmental revenue have no significant influences to budget transparency on local government websites in Indonesia

Keywords: Local Government, Budget Transparency, Website, Indonesia,

Abstrak

Terdapat kesenjangan dalam praktik transparansi anggaran melalui website dan sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana tingkat pendidikan tinggi, akses internet di rumah tangga, pendapatan daerah, belanja daerah dan dana perimbangan mempengaruhi transparansi anggaran pada website resmi pemerintah daerah. Data penelitian ini terdiri dari 102 dokumen anggaran selama periode 2017–2019 yang dikumpulkan dari 34 pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode sensus. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi dan akses internet di rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi anggaran pada website pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan pendapatan asli daerah, belanja daerah dan pendapatan antar pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran pada pemerintah daerah. website pemerintah di Indonesia.

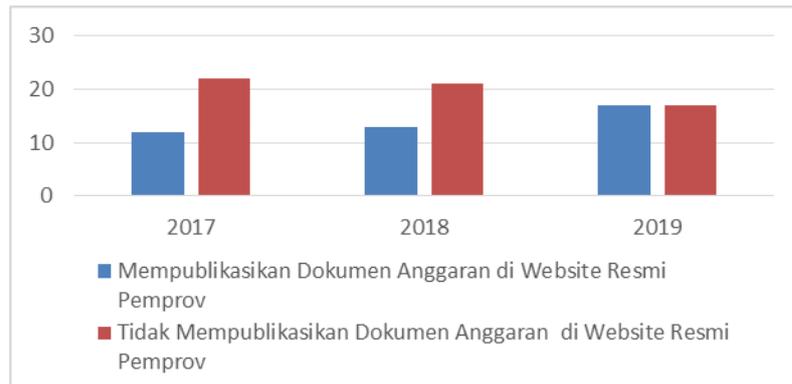
Kata kunci: Pemerintah Daerah, Transparansi Anggaran, Website, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat pemerintah perlu menyampaikan informasi terkait apa yang dilakukan untuk masyarakatnya. Hal ini kemudian direspon dengan keluarnya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, tujuannya adalah kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi publik. Selain peraturan di atas, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65/2010 pada Pasal 13 menyatakan bahwa *"Pemerintah daerah (pemda) berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk menyalurkan informasi keuangan melalui situs resmi*

(*website*) masing-masing.” Namun sampai saat ini level pengungkapan informasi keuangan masih berbeda-beda di *website* Pemda.

Hasil dari survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terlihat pada gambar 1, pengungkapan dokumen anggaran provinsi di Indonesia masih berfluktuasi. Hal ini terlihat hanya terdapat 12 provinsi pada tahun 2017, 13 provinsi tahun 2018 dan 17 provinsi tahun 2019 yang mempublikasikannya dokumen anggarannya secara *online* diwebsite resminya. Grafik terkait hal di atas bisa dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Provinsi yang mempublikasikan dan tidak mempublikasikan Dokumen Anggaran di Website Resminya Tahun 2017-2019

Sumber: Data penelitian, 2021

Dilihat Berdasarkan tabel di atas ada gab praktik transparansi informasi keuangan pada situr resmi pemerintah dan kebanyakan pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Hal bertolak belakang dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintan terkait keterbukaan informasi publik, yang seharusnya direpon oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public (Verawaty, 2014).

Terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi pemerintah daerah mempublikasikan anggarannya secara *online* pada *website* resmi pemerintah sebagai bentuk transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi tentang organisasi, yang memungkinkan pihak eksternal dapat memantau kinerja organisasi tersebut (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). Asumsi yang mendasari transparansi adalah pemerintah harus melaporkan mengapa, bagaimana, apa, dan berapa harga dari suatu kegiatan dan informasi ini harus tersedia untuk umum (Da Cruz et al., 2016) Jika dikaitkan dengan anggaran, transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana kemudahan warga negara dapat mengakses informasi tentang anggaran dan memberikan umpan balik tentang pendapatan, alokasi, dan pengeluaran pemerintah (World Bank, 2015). Sedangkan transparansi anggaran yang dilakukan secara *online* (*Online Budget Transparency*), didefinisikan sebagai

kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara *online* terkait anggaran secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami (OECD, 2017). Semakin banyak pemerintah menggunakan situs webnya untuk menyediakan transparansi yang lebih besar melalui *Open Government Data* (OGD), maka akan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah akan semakin besar. Informasi anggaran melalui OGD telah menjadi mekanisme untuk mengamankan kinerja dan akuntabilitas yang lebih besar dari aktivitas pemerintah (Reddick et al., 2017)

Perkembangan *e-government* dinegara tertentu sangat tergantung dari tingkat pendidikan rakyatnya. Semakin tinggi level pendidikan masyarakatnya tentu akan berdampak pada tuntutan yang lebih luas terkait pengungkapan informasi publik, apalagi terkait layanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Tuntutan ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui kemana pendapatan pemerintah yang berasal salah satunya dari pajak yang dibayarkan akan dibelanjakan. Pérez et al., (2008) menyatakan tingkat pendidikan masyarakat pada suatu daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangannya karena tuntutan dari masyarakat yang semakin besar. Nor et al., (2019) menyatakan peningkatan level pendidikan disuatu daerah akan meningkatkan tuntutan pertanggungjawaban terhadap pemda terkait informasi keuangan. Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap keterbukaan informasi publik (Pérez et al., 2008).

Perkembangan internet beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sangat pesat sehingga pertukaran informasi yang lebih mudah dan murah. Mudah dan murah nya harga akses membuat level akses internet semakin naik. Tingkat ketersediaan akses internet yang semakin mudah dan murah membuat peluang dalam melakukan kontrol terhadap pemda menjadi lebih mudah. Kemudahan akses internet akan membentuk kontrol lewat internet menjadi lebih tinggi sehingga dorongan untuk mengungkapkan informasi keuangan pada website Pemda semakin besar (Rahim & Martani, 2016). Hasil penelitian Rahim & Martani (2016) dan Pérez et al., (2008), menemukan akses internet memiliki dampak positif apada pengungkapan informasi keuangan ke masyarakatnya.

Untuk memenuhi pelayanan kepada publik, pemerintah daerah harus memiliki pendapatan daerah. Salah satu kinerja dari pemda dapat dilihat dari pendapatan daerahnya. Menurut Lesmanawati (2019), *local municipal wealth* (pendapatan daerah) merupakan indikasi bahwa daerah tersebut mampu mengelola sumber dayanya dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya. Menurut Aminah et al., (2019), pemda dalam melaksanakan program yang merupakan tugasnya dalam memberikan layanan pada masyarakat perlu secara kontinu

meningkatkan kualitas layanan dan hal itu sangat didukung pendapatan daerah. Jadi semakin besar pendapatan daerah seharusnya bisa melaksanakan tugas dengan baik pada masyarakatnya. Undang-undang Republik Indonesia No.17/2003 terkait dengan Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan penambah kekayaan bersih. Semakin besar pendapatan suatu daerah semestinya akan mendorong pemda untuk mempublikasikan anggarannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakatnya sebagai bukti bahwa pendapatan daerah telah dikelola secara transparan.

Pada APBD selain pendapatan daerah, belanja daerah dapat menjadi faktor utama untuk melihat kemana pendapatan dibelanjakan. Sebagai bentuk transparansi tentu hal ini akan menjadi pendorong pemda untuk melakukan publikasi terkait belanjanya. Kenaikan belanja daerah memperlihatkan bahwa pemda akan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat (Pratama et al., 2015). Bagi pemda yang mempunyai anggaran belanja yang tinggi maka didorong untuk lebih transparan atas pengelolaan anggarannya sebagai bentuk akuntabilitas pada publik. Pratama et al., (2015) menemukan belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan keuangan. Pemda yang mempublikasi anggaran belanja daerah dapat membangun persepsi pihak luar bahwa anggaran belanja telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemda untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut (Alhajjriana et al., 2018)

Selain mengelola pendapatan daerah dengan baik, pemda juga perlu mengelola pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, dana yang dimaksud adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Undang-undang Republik Indonesia No.23/2014, disebutkan dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lesmanawati (2019) menyatakan peningkatan jumlah anggaran dari dana perimbangan akan berdampak pada peningkatan pengungkapan informasi keuangan, hal ini karena bentuk respon pemda kepada pihak pemerintah pusat atas dana yang dikelolanya. Besarnya dana perimbangan yang dibelanjakan, mengharuskan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkannya, sehingga pemerintah daerah perlu mengungkapkannya sebagai bentuk transparansi (Lesmanawati, 2019)

Perbedaan riset ini dari riset sebelumnya adalah berfokus pada transparansi anggaran yang dipublikasikan pada *website* resmi pemerintah sedangkan riset-riset sebelumnya lebih berfokus pada pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah provinsi/

kabupaten/kota di Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang diajukan peneliti juga tidak hanya memasukkan unsur dari laporan realisasi anggaran, tapi juga memasukkan aspek diluar LRA seperti akses internet dan tingkat pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan tinggi, akses internet dirumah, pendapatan daerah, belanja daerah dan dana perimbangan terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi untuk menerapkan transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah sebagai bentuk transparansi informasi keuangan khususnya anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan di Pemerintah Daerah

Menurut (Mulgan, 1997), hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara negara dapat disamakan dengan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan wewenang dan kepercayaan kepada agen. Agen melaporkan pertanggung-jawabannya kepada prinsipal. Bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Jika dikaitkan dengan riset ini maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah sebagai agen perlu memberikan informasi terkait transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat sebagai prinsipal melalui media *online* pada *website* resmi pemerintah untuk kemudahan akses informasi

Teori Organisasi Pembelajaran

Organisasi pembelajaran (*Learning Organization*) adalah “*suatu konsep dimana organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self learning) sehingga organisasi tersebut memiliki ‘kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul.’*” (Senge, 1990). Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagai entitas, pemda harus *update* terhadap teknologi. Secara umum dapat digambarkan bahwa sebagai organisasi, pemerintah perlu mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai organisasi perlu terus belajar untuk merespon beragam perubahan yang muncul, salah satunya adalah kebutuhan atas akses informasi yang cepat, murah dan mudah.

Transparansi Anggaran

Saat ini berbagai kegiatan pengelolaan keuangan dipemerintahan perlu didukung oleh sistem teknologi. Tujuannya adalah agar transparansi anggaran dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Hal ini merupakan cara bagi pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Republik Indonesia No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *"Badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik."* Transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi tentang organisasi, yang memungkinkan pihak eksternal dapat memantau kinerja organisasi tersebut (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). Asumsi yang mendasari transparansi adalah pemerintah harus melaporkan mengapa, bagaimana, apa, dan berapa harganya kegiatan dan ini harus tersedia untuk umum (Da Cruz et al., 2016). Jika dikaitkan dengan anggaran, transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana kemudahan warga negara dapat mengakses informasi tentang anggaran dan memberikan umpan balik tentang pendapatan, alokasi, dan pengeluaran pemerintah (World Bank, 2015). Sedangkan transparansi anggaran yang dipublikasikan secara online didefinisikan sebagai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara *online* terkait anggaran secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami (OECD, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Pendidikan Tinggi Terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

UU Republik Indonesia No. 12/2012), tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyatakan pendidikan adalah *"usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."* Tingkat pendidikan merupakan suatu proses dengan waktu tertentu yang terdiri dari prosedur sistematis dan terorganisir untuk mempelajari pengetahuan.

Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi keinginan untuk mencari informasi publik melalui web resmi pemerintah. Tuntutan ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui sejauhmana informasi keuangan diungkapkan oleh pemerintahnya. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk membuka kesadaran masyarakat untuk sadar akan pentingnya berpartisipasi untuk mengawasi setiap kebijakan pemda. Pengawasan masyarakat pada pemda untuk mendorong penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Prabowo et al., 2014)

Pérez et al., (2008) menyatakan tingkat pendidikan masyarakat pada suatu daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangannya karena tuntutan yang semakin besar. Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap keterbukaan informasi (Pérez et al., 2008). Nor et al., (2019) menyatakan peningkatan tingkat pendidikan disuatu daerah akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

H1: Tingkat pendidikan tinggi Berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Pengaruh Akses Internet di Rumah Tangga Terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Saat ini sangat besar kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan internet. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan jumlah pengguna internet di Indonesia. Internet merupakan hubungan atau koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya di seluruh muka bumi lewat *server* dan *router* terdedikasi. Mengakses internet merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan interaksi pengguna dengan komputer yang terkoneksi dengan internet. Mengakses internet dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti komputer pribadi, telepon seluler, televisi kabel, dan lain sebagainya (Ruth, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), persentase rumah tangga yang memiliki akses internet merupakan “jumlah dari jumlah tangga yang mempunyai akses internet dibagi jumlah rumah tangga didaerah tertentu secara keseluruhan.” Apabila terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet, maka kenaikan persentase rumah tangga yang memanfaatkan TI juga semakin meningkat.

Menurut Rahim & Martani (2016), saat ini tingkat akses internet di Indonesia masih bervariasi. Padahal akses internet adalah salah satu alternatif untuk memperoleh informasi mengenai keuangan pemerintah. Bagi pemda yang memiliki masyarakat yang mengakses internet lebih banyak biasanya akan memiliki tekanan yang lebih banyak mengungkapkan informasi terkait keuangan pemda karena pengawasan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Pemakaian internet diharapkan dapat memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara langsung dan mudah diakses, artinya informasi akan lebih banyak disebarkan dan digunakan oleh publik. Semakin banyak akses internet dirumah tangga maka pemerintah di daerah melalui kebijakan promosi internet perlu menyediakan lebih banyak

informasi laporan keuangan. Sehingga internet dapat menjadi alat untuk transparansi dan juga promosi bagi pemerintah daerah. Tingkat penetrasi internet secara *online* akan berdampak pada diseminasi informasi keuangan publik. Disisi lain di kota-kota dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi, mengharuskan anggota dewan untuk memperkenalkan informasi keuangan dan kegiatan-kegiatan mereka secara *online* (Pérez et al., 2008). García-Tabuyo et al., (2016) dan Lowatcharin & Menifield (2015), menemukan bahwa ada dampak yang positif antara akses internet dengan pengungkapan wajib secara online di website resmi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka diduga tingkat penetrasi internet yang tinggi di rumah tangga akan berpengaruh terhadap pemerintah untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan di internet, karena akan ada lebih banyak lagi pengguna potensial.

H₂: Akses internet dirumah tangga Berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.17/2003 tentang Keuangan Negara, “*pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.*” Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan berupa uang melalui rekening kas umum daerah dan menjadi hak pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Mahsun et al., 2012). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17/2003, “*pendapatan daerah menambah kekayaan bersih daerah dan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.*”

Pratama et al., (2015), menemukan peningkatan pendapatan daerah akan berdampak pada pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah yang semakin besar. Semakin tinggi pendapatan daerah yang didapatkan oleh pemda artinya tanggung jawab pemda untuk menyampaikan informasi kepada public semakin tinggi. Hal ini bertujuan untuk membangun persepsi pihak eksternal bahwa semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh artinya sumber daya yang ada telah dikelola dengan baik. Peneliti lain juga menemukan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi (Jaya & Sisdyan, 2014). Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Pendapatan Daerah Berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “*Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.*” Belanja daerah ditujukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Kenaikan belanja daerah semestinya dapat memperlihatkan bahwa pemda akan memberikan layanan yang lebih baik diantaran untuk untuk menyampaikan dana yang dikelolanya kepada publik (Pratama et al., 2015). Pratama et al., (2015) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan keuangan melalui internet. Begitu pula dengan Alhajjriana et al., (2017) yang menemukan pendapatan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

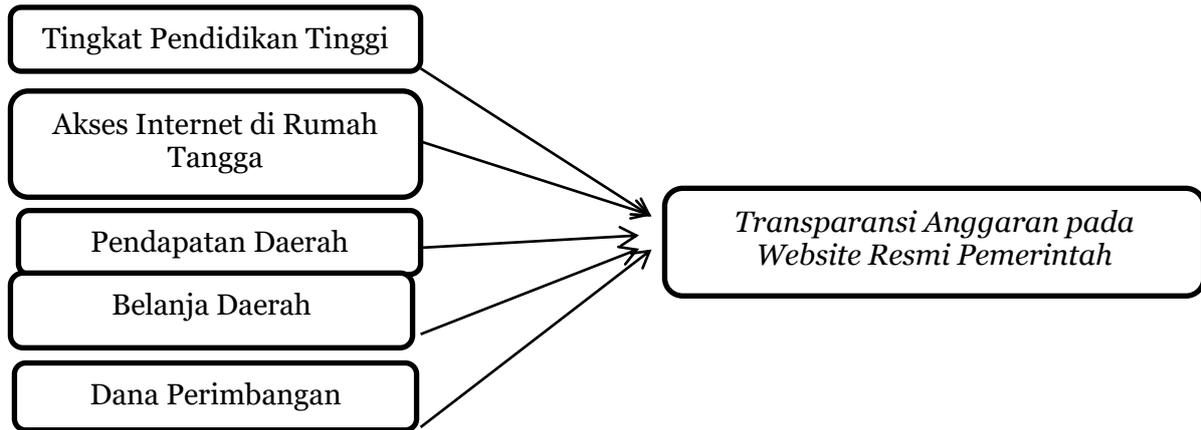
H4: Belanja Daerah Berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No.23/2014, disebutkan dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk praktinya harus ada pengawasan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas.

Peningkatan pengungkapan perlu dilakukan jika dana perimbangan semakin besar sebagai bentuk akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pemerintah pusat, dana itu akan dialokasikan sesuai anggaran yang sepakati. Besarnya informasi keuangan yang diungkapkan biasanya timbul oleh besarnya dana perimbangan, hal ini dikarenakan rasa tanggungjawab pemda pada pemerintah pusat atas dana yang dikelolanya. Pengungkapan LKPD diweb resmi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemda. Ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat akan mendorong pemda untuk meningkatkan pengungkapan terhadap LKPD nya (Waliyyani & Mahmud, 2015). Hipotesis yang di ajukan adalah:

H5: Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Data Penelitian, 2021

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya, sedangkan pendekatannya menggunakan analisis kuantitatif. Adapun objek penelitian ini adalah transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah, tingkat pendidikan tinggi, akses internet dirumah tangga, pendapatan daerah, belanja daerah dan dana perimbangan. Adapun unit analisis adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sensus yang akan meneliti seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Namun penelitian ini ada kriteria yang ditetapkan yaitu data yang terkait dengan penelitian tersedia di *web* pemerintah. Di Indonesia terdapat 34 pemerintah provinsi. Provinsi di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data transparansi anggaran diperoleh dengan mengakses situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Data terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan dana perimbangan didapatkan dari situs resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sedangkan data tingkat pendidikan dan akses internet di rumah tangga diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS)

Definisi Operasional Variabel

Transparansi Anggaran

Transparansi Anggaran (*online budget transparency*) didefinisikan sebagai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara *online* terkait anggaran secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami (OECD, 2017). Variabel ini diukur yang

menggunakan variabel biner atau dikotomik yakni 0 “mempublikasikan” atau 1 “tidak mempublikasikan” dokumen anggaran secara *online* di website resmi pemerintah provinsi.

Tingkat Pendidikan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia No. 12/2012), tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyatakan “*pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.*” Tingkat pendidikan merupakan suatu proses dengan waktu tertentu yang terdiri dari prosedur sistematis dan terorganisir untuk mempelajari pengetahuan. Variabel tingkat pendidikan menggunakan indikator yang digunakan Pérez et al., (2008), dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pendidikan Tinggi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa di Perguruan Tinggi}}{\text{Total Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Akses Internet Rumah Tangga

Akses internet rumah tangga adalah setiap rumah tangga yang terhubung dengan internet dan mengakses internet baik untuk media sosial maupun media informasi (Pérez et al., 2008). Variabel akses internet di rumah tangga menggunakan indikator yang digunakan Pérez et al., (2008), dengan rumus:

$$\text{Akses Internet di RT} = \frac{\text{Jumlah Akses Internet di Rumah Tangga}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2003 “*Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.*” Variabel pendapatan daerah diukur dari LN total pendapatan daerah yang dilaporkan pada LRA.

Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2003 “*Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.*” Variabel belanja daerah diukur dari LN total belanja daerah yang dilaporkan pada LRA.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2003 “*Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah*

(otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan *Desentralisasi Fiskal*.” Variabel belanja daerah diukur dari LN total dana perimbangan yang dilaporkan pada LRA.

Teknik Analisis Data

Regresi logistik merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau bagaimana pengaruh beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen (terikat) yang merupakan variabel biner yang *diberi kode angka 1 atau 0*. Pada pengujian regresi logistik tidak perlu dilakukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2018).

Secara umum, persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\text{Ln}X_3 + b_4\text{Ln}X_4 + b_5\text{Ln}X_5 + e$$

Keterangan:

- $\text{Ln} \frac{p}{1-p}$ = *Transaparansi Anggaran (Y)*
- b_0 = Konstanta
- Ln = Logaritma Natural
- X_1 = Tingkat Pendidikan
- X_2 = Akses Internet di Rumah Tangga
- X_3 = Pendapatan Daerah
- X_4 = Belanja Daerah
- X_5 = Dana Perimbangan
- b_1 - b_5 = Koefisien Regresi
- e = *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel menjabarkan informasi terkait masing-masing variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	102	.0096	.1250	.033342	.0216847
Akses Internet	102	.2733	.9333	.625605	.1321204
Ln Pendapatan Daerah	102	28.20	31.80	29.5144	.83936
Ln Belanja Daerah	102	28.18	31.80	29.4945	.83016
Ln Dana Perimbangan	102	27.97	30.57	28.9111	.62410
Tranparansi Anggaran	102	0	1	.294118	.488
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Variabel tingkat pendidikan tinggi diukur dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar diperguruan tinggi dibagi jumlah penduduk x 100%. Tingkat pendidikan tinggi pada provinsi di Indonesia tahun anggaran 2017-2019 memiliki *mean* 0,33342 dan nilai *standard deviation*

0,0216847. Nilai minimum 0,0096 dan nilai maksimum 0,1250. Adapun Provinsi yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yang tertinggi yakni DKI Jakarta Tahun 2018 sedangkan provinsi dengan tingkat pendidikan tinggi terendah tahun 2017 adalah provinsi Bangka Belitung.

Variabel akses internet di rumah tangga diukur dengan jumlah rumah tangga yang terakses internet dibagi dengan jumlah rumah tangga x 100%. Akses internet di rumah tangga tahun 2017-2019 memiliki nilai *mean* 0,625605 dan *standard deviation* 0.1321204. Nilai minimum 0,2733 dan maksimum 0,9333. Adapun Pemerintah Provinsi yang memiliki akses internet di rumah tangga tertinggi yakni provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sedangkan provinsi dengan akses internet di rumah tangga terendah tahun 2017 adalah provinsi Papua.

Variabel pendapatan daerah diukur dari LN total pendapatan daerah yang dilaporkan pada LRA. Pendapatan daerah tahun 2017-2019 memiliki nilai *mean* 29,5144 dan *standard deviation* 0.83936. Nilai minimum 28,20 dan maksimum adalah 31,80. Adapun Pemerintah Provinsi yang memiliki pendapatan daerah tertinggi yakni provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sedangkan provinsi dengan akses internet di rumah tangga terendah tahun 2017 adalah provinsi Gorontalo.

Variabel belanja daerah diukur dari LN total belanja daerah yang dilaporkan pada LRA. Belanja daerah tahun 2017-2019 memiliki nilai *mean* 29,4945 dan *standard deviation* 0.83016. Nilai minimum 28,20 dan maksimum 31,80. Adapun Pemerintah Provinsi yang memiliki belanja daerah tertinggi yakni provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sedangkan provinsi dengan akses internet di rumah tangga terendah tahun 2017 adalah provinsi Gorontalo

Variabel dana perimbangan diukur dari LN total dana perimbangan yang dilaporkan pada LRA. Dana perimbangan tahun 2017-2019 memiliki nilai *mean* 28,9111 dan *standard deviation* 0.62410. Nilai minimum 27,97 dan maksimum 30,57. Adapun Pemerintah Provinsi yang memiliki pendapatan daerah tertinggi yakni provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sedangkan provinsi dengan akses internet di rumah tangga terendah tahun 2018 adalah provinsi Gorontalo.

Terkait dengan transparansi anggaran yang diukur menggunakan variabel biner atau dikotomik yakni 0 “mempublikasikan” atau 1 “tidak mempublikasikan” dokumen anggaran secara *online* di website resmi pemerintah provinsi.

Pengujian data untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS 25 dengan tingkat keyakinan 95%. Berdasarkan tabel 2 yang merupakan hasil uji *Overall Model Fit* dengan hanya menggunakan konstanta tanpa memasukkan variabel

independen diperoleh nilai *-2 loglikelihood* sebesar 135,702. Selanjutnya untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak atau tidak maka nilai dari *-2 loglikelihood* dengan hanya menggunakan konstanta harus dibandingkan dengan nilai *-2 loglikelihood* setelah memasukkan variabel independen.

Tabel 2. -2LL dari konstanta

-2LL dari konstanta Iteration History ^{a,b,c}			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	135.704	-.471
	2	135.702	-.480
	3	135.702	-.480

- a. Constant is included in the model.
 b. Initial -2 Log Likelihood: 135.702
 c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3 berikut hasil uji *Overall Model Fit* dengan menambahkan variabel independen.

Tabel 3. -2LL dari konstanta dan variabel independen

Iteration History ^{a,b,c,d}								
Iteration		Coefficients						
		-2 Log likelihood	Log Constant	Tingkat Pendidikan	Akses Internet	Ln Pendapatan Daerah	Ln Belanja Daerah	Ln Dana Perimbangan
Step 1	1	106.726	-29.582	17.994	3.394	-4.248	4.312	.851
	2	103.680	-40.096	29.988	4.756	-6.094	6.227	1.100
	3	103.478	-42.371	35.380	5.145	-6.483	6.659	1.121
	4	103.475	-42.508	36.164	5.179	-6.510	6.692	1.118
	5	103.475	-42.509	36.177	5.179	-6.511	6.693	1.118
	6	103.475	-42.509	36.177	5.179	-6.511	6.693	1.118

- a. Method: Enter
 b. Constant is included in the model.
 c. Initial -2 Log Likelihood: 135.702
 d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3 di atas merupakan hasil model fit yang telah dimasukkan semua variabel independen yaitu Tingkat Pendidikan Tinggi, Akses Internet di rumah Tangga, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Dana Perimbangan dengan hasil nilai *-2 loglikelihood* sebesar 103,475. Berikut tabel perbandingan antara hasil uji *Overall Model Fit* tanpa menggunakan

variabel independen dan dengan memasukkan variabel independen.

Tabel 4 Omnibus Test of Model

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	32.227	5	.000
	Block	32.227	5	.000
	Model	32.227	5	.000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan nilai chi-square sebesar 32,227 yang merupakan selisih antara nilai -2 loglikelihood konstanta yaitu 135,702 dan nilai -2 loglikelihood dengan memasukkan variabel independen yaitu 103,475. Hal tersebut berarti terjadi penurunan nilai chi square block 0 pada nilai chi square block 1. Berdasarkan tabel di atas terlihat pula bahwa nilai signifikansi dari model yang digunakan adalah 0,000, nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa hasil uji *Overall model fit* menunjukkan model fit dengan data yang digunakan.

Tabel 5. Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	103.475 ^a	.271	.368

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data Penelitian, 2021

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen secara parsial dimana pada penelitian ini digunakan uji Nagelkerke R Square yang merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell R Square. Tabel 5 di atas menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,368 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 38,7%, sedangkan 61,3% (100% - 36,8%) dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar yang variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 6. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	9.207	8	.325

Hasil dari tabel 6 di atas diperoleh nilai signifikan 0,325 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Nilai signifikan yang lebih besar menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara model dan data atau dengan kata lain model dinyatakan fit dan dapat diterima. Selanjutnya dilakukan uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji statistik χ^2 (chi-square). Apabila χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel atau p-tabel yang lebih kecil dari α 5% maka hal tersebut berarti terdapat pengaruh simultan. Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji omnibus test (Ghozali, 2018). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, berarti bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan apabila signifikansi $> 0,05$, berarti bahwa variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H1 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 7. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	32.227	5	.000
	Block	32.227	5	.000
	Model	32.227	5	.000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Uji hipotesis simultan variabel independen dengan menggunakan omnibus test seperti yang dapat dilihat pada table 7 di atas menghasilkan nilai signifikan model sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal tersebut menjadi indikasi bahwa variabel independen penelitian yang digunakan yaitu Tingkat Pendidikan Tinggi, Akses Internet di Rumah Tangga, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan (serentak) berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Tingkat Pendidikan	36.177	17.859	4.104	1	.043	51473312307 95861
	Akses Internet	5.179	2.234	5.374	1	.020	177.504
	Ln Pendapatan Daerah	-6.511	4.531	2.065	1	.151	.001
	Ln Belanja Daerah	6.693	4.534	2.179	1	.140	806.436
	Ln Dana Perimbangan	1.118	1.251	.798	1	.372	3.057
	Constant	-42.509	13.785	9.510	1	.002	.000

a. Variable(s) entered on step 1: Tingkat Pendidikan, Akses Internet, Ln Pendapatan Daerah, Ln Belanja Daerah, Ln Dana Perimbangan.

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil penelitian koefisien regresi variabel tingkat pendidikan tinggi adalah 36,177 dan nilai signifikansi sebesar 0,043, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, variabel tingkat pendidikan tinggi berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi atau semakin besarnya jumlah penduduk yang belajar di perguruan tinggi di suatu daerah mendorong pemda untuk melakukan transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi.

Berpengaruhnya tingkat pendidikan tinggi terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi diduga masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung akan aktif mencari informasi publik. Tentu hal ini perlu direspon oleh pemda untuk terus menerus mengelola informasi yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Peningkatan aspek sumber daya manusia, prasarana dan sarana teknologi yang terus menerus dilakukan setiap daerah tentu akan berpengaruh terhadap penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Peningkatan kapasitas organisasi khususnya dalam melakukan inovasi dan transformasi sangat tergantung pengetahuan. Pada teori organisasi pembelajaran, perubahan merupakan poin penting dalam transformasi suatu organisasi. Agar dapat tetap bertahan dan berkembang, maka organisasi harus tumbuh dan berkembang dengan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapinya. Sehingga organisasi perlu mengantisipasi perubahan dan perlu terus belajar sehingga dapat bertahan atau bahkan mampu meningkatkan kinerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Pérez et al., (2008) yang menemukan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemajuan *e-government*, karena lebih banyak menginginkan informasi yang diberikan oleh pemerintah secara *online*.

Berdasarkan hasil penelitian koefisien regresi variabel akses internet di rumah tangga adalah 5,179 dan nilai signifikansi sebesar 0, 020, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya,

variabel akses internet di rumah tangga berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi atau semakin besarnya jumlah akses internet di rumah tangga di suatu daerah mendorong pemda untuk melakukan transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi.

Berpengaruh tingkat akses internet di rumah tangga terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi diduga kebutuhan masyarakat yang semakin banyak akan informasi publik. Jika dihubungkan dengan teori organisasi pembelajaran maka perubahan merupakan jawabannya karena pada prinsipnya perubahan merupakan sesuatu mesti terjadi dalam organisasi. Untuk dapat tetap bertahan dan berkembang, maka organisasi perlu melakukan penyesuaian, salah satunya melalui pengembangan teknologi informasi (TI). Menurut Dalt (2010), bentuk inovasi akan terus berkembang dalam menghadapi perubahan manajemen. Organisasi perlu berkembang untuk mencari konsep kekinian dalam mengelola untuk dapat menjawab dorongan dari lingkungan saat ini. Perkembangan pada organisasi pembelajaran dalam mengelola lingkungan kerja berdasarkan teknologi merupakan 2 inovasi manajemen terbaru.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahim & Martani (2016), Lowatcharin & Menifield (2015) dan Pérez et al., (2008), yang menemukan akses internet di rumah tangga akan mempengaruhi tingkat penetrasi internet secara *online* terkait informasi keuangan publik.

Berdasarkan hasil penelitian koefisien regresi variable pendapatan daerah adalah - 6,511 dan tingkat signifikansi sebesar 0,151, lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, variable pendapatan daerah yang di ukur dengan Ln pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi.

Menurut Ulum (2012), pada teori agensi tersirat bagaimana relasi pemerintah (agent) dan masyarakat (prinsipal). Masyarakat sebagai prinsipal menyerahkan sumber daya untuk daerahnya melalaui pajak dan lain-lain. Bagi agent, laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi disisi lain juga untuk menunjukkan bentuk layanan kepada masyarakatnya. Masyarakat mempunyai kepentingan terhadap laporan pertanggungjawaban, karena masyarakat mempunyai memiliki hak untuk tahu bagaimana pengelolaan oleh pemerintah terhadap sumberdaya yang diberikan kepada pemerintah.

Pemda yang melakukan transparansi anggaran agar dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh akan dibelanjakan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Relasi keagenan pada sektor publik merupakan sebuah pendelegasian, yakni pendelegasian dari masyarakat pada wakilnya di parlemen kemudian dari parlemen kepada pemerintah. Hal

inilah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dikelolanya pada masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga pendapatan daerah, merupakan salah satu sumber yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakatnya. Transparansi anggaran di *website* resmi pemerintah provinsi dapat meningkatkan kepercayaan pihak prinsipal terhadap pemda. Transparansi anggaran di *website* resmi pemerintah akan memudahkan prinsipal untuk mengetahui pendapatan daerah yang digunakan meningkatkan kualitas layanan.

Hasil penelitian sesuai dengan Simbolon & Kurniawan (2018), yang menemukan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan secara online, namun tidak sesuai dengan penelitian Jaya & Sisdyan (2014), yang menemukan kekayaan atau pendapatan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan secara *online*.

Berdasarkan hasil penelitian koefisien regresi variable belanja daerah adalah 6,693 dan nilai signifikansi sebesar 0,140, lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja daerah pemerintah provinsi tidak mendorong pemda untuk melakukan transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi.

Menurut Ulum (2012), pemerintah sebagai agen haruslah bisa menjadi subjek pemberi informasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakatnya. Pada konteks *agency theory* pemberian informasi ditujukan untuk meminimalkan asimetri informasi. Laporan pertanggungjawaban yang salah satunya terkait dengan transparansi anggaran merupakan hal penting yang perlu diberikan pemerintah sehingga informasi kinerja pemerintah dari belanja daerah bisa terlihat dan kebermanfaatnya bisa dinikmati masyarakatnya

Transaparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai pengelola untuk mengungkapakan informasi anggaran pada masyarakat untuk akses informasi yang lebih mudah. Tranparansi anggaran belanja daerah pada *website* resmi pemerintah merupakan bentuk transparansi kepada publik atas dana yang dikelolanya. Disisi lain masyarakat bisa melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, transparansi anggaran bagi pemda untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat lebih mudah. Namun karena tidak sanksi terkait kewajiban untuk mempublikasikan informasi keuangannya sehingga tidak semua pemda yang melakukan transparansi anggarannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Alhajjriana et al., (2018) dan Pratama et al., (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian koefisien dana perimbangan sebesar 1,118 dan nilai signifikansi sebesar 0,372, lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, variable dana perimbangan tidak berpengaruh transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan dana perimbangan tidak mendorong pemda untuk melakukan transparansi anggaran di *website* resmi pemerintah provinsi.

Menurut Scott (2015), pada teori keagenan terdapat dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen. Hubungan ini merupakan kontrak antara principal dan agent, principal adalah pihak memberi tugas kepada agent agar bekerja untuk kepentingan principal. Jika dikaitkan teori agensi pada riset ini adalah seiring dengan konsep otonomi daerah yang terjadi di Indonesia, dimana besarnya dana perimbangan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah pusat menuntut pemda untuk mempertanggungjawabkannya. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah. Harapannya adalah bahwa transparansi anggaran pada *website* resmi itu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi pada masyarakat dalam bentuk transparansi informasi keuangan. Namun ketidakjelasan sanksi diduga menyebabkan sebagian besar pemda tidak terdorong untuk mempublikasikan informasi keuangannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Simbolon & Kurniawan (2018), dan Waliyyani & Mahmud (2015) yang menemukan tidak adanya pengaruh antara dana perimbangan terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

SIMPULAN

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tinggi dan akses internet rumah tangga berpengaruh positif terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi. Sedangkan pendapatan daerah, belanja daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah beberapa *website* pemerintah ketika riset ada yang masih dalam proses perbaikan, sehingga peneliti tidak bisa mencari data yang dibutuhkan. Implikasi riset bagi pemerintah provinsi sebaiknya dokumen anggaran langsung di *website* resmi, tidak dimasukkan pada website SOPD sehingga akses lebih mudah ketika membutuhkan informasi terkait anggaran. Untuk peneliti selanjutnya, perlu memperluas skope riset seperti memperluas dengan sampel pemerintah kabupaten/kota. Peneliti berikutnya

dapat memperluas variabel lain seperti hutang daerah dan besarnya anggota DPRD.

Referensi

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.226>
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*.
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- Dalt, R. (2010). *New Era Of Management (Era Baru Manajemen)*. Salemba Empat.
- García-Tabuyo, M., Sáez-Martín, A., & Caba-Pérez, M. D. C. (2016). Mandatory versus voluntary disclosures: Drivers of proactive information provision by local governments in Central America. *Information Development*, 32(4), 1199–1215. <https://doi.org/10.1177/0266666915595260>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Jaya, J. D. J., & Sisdyan, E. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 2, 285–303. https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3940
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh local government wealth , intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di indonesia secara online. *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 109–116.
- Lowatcharin, G., & Menifield, C. E. (2015). Determinants of Internet-enabled Transparency at the Local Level. *State and Local Government Review*, 47(2), 102–115. <https://doi.org/10.1177/0160323x15593384>
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). BPF.
- Mulgan, R. (1997). The Processes of Public Accountability. Australian. *Journal of Public Administration*, 56(1), 26–36.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial Statements Disclosure on Indonesian Local Government Websites A Quest of Its Determinant (s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128.
- OECD. (2017). OECD Budget Transparency Toolkit: Practical steps for supporting openness, integrity and accountability in Public Financial Management. In *OECD Publishing*. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264282070-en%0A>
- Pérez, C. C., Bolívar, M. P. R., & Hernández, A. M. L. (2008). E-Government process and incentives for online public financial information. *Online Information Review*, 32(3), 379–400. <https://doi.org/10.1108/14684520810889682>
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 1–33. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5600/5401>
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan

- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3(1), 12.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Puron-Cid, G. (2017). Online budget transparency innovation in government: A case study of the U.S. state governments. *ACM International Conference Proceeding Series, Part F1282*(December), 232–241. <https://doi.org/10.1145/3085228.3085271>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 17 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 65 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Ruth, E. (2015). Deskripsi Kualitas Layanan Jasa Akses Internet di Indonesia dari Sudut Pandang Penyelenggara. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(2), 137. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110204>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Printice Hall.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization*. Currency Doubleday.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.
- Ulum, A. S. (2012). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 60–66. <https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1945>
- Verawaty. (2014). The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research Annual Subscriptions*, 4(2).
- Waliyyani, G. ., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8.
- World Bank. (2015). *Budget Transparency: What, Why, and How?*